

Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2026-2030:

Daftar Prioritas Saja Tidak Cukup



2026



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Daftar Isi

BAB 1	HLM
Peluang Diversifikasi Belum Menjadi Kapabilitas Industri	3
BAB 2	HLM
Dukungan Industri Belum Diarahkan pada Hasil yang Sama	6
BAB 3	HLM
KIN Perlu Mengubah Arah Industrialisasi Menjadi Misi yang Operasional	9
BAB 4	HLM
Transformasi Industri juga Ditentukan di Daerah	11
BAB 5	HLM
Peluang Diversifikasi Belum Menjadi Kapabilitas Industri	12
BAB 6	HLM
Membangun Tata Kelola untuk Pendekatan Berorientasi Misi	13
BAB 7	HLM
Rekomendasi Kebijakan	15

Pesan Kunci:

- 1** Indonesia memiliki ruang diversifikasi yang luas, tetapi berisiko tidak optimal jika tidak diimbangi penguasaan kapabilitas industri domestik. Peringkat ke-7 dunia dalam Complexity Outlook berbanding terbalik dengan posisi ke-69 dalam *Economic Complexity Index* (ECI) 2024, mencerminkan bahwa diversifikasi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya diikuti peningkatan kompleksitas ekspor. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada penambahan fasilitas pengolahan fisik, melainkan wajib memperdalam kemampuan teknologi, riset, dan daya saing pemasok dalam negeri.
- 2** Dukungan fiskal pemerintah masih lebih kuat mendorong investasi fisik daripada membangun kapabilitas inovasi dan transfer teknologi. Ketimpangan ini tercermin dalam belanja perpajakan 2024: fasilitas *tax holiday* mencapai Rp6,25 triliun, sementara insentif *superdeduction* untuk kegiatan riset hanya terealisasi Rp3 miliar. Karena itu, setiap fasilitas publik perlu disertai persyaratan capaian (*conditionalities*) yang terukur agar insentif fiskal menghasilkan tambahan kapabilitas industri, bukan sekadar menjadi transfer manfaat kepada korporasi.
- 3** Penyusunan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2026-2030 pada 2026 harus dimanfaatkan sebagai instrumen pengikat kebijakan lintas sektor, bukan sekadar kompilasi daftar industri prioritas. KIN baru perlu menyatukan instrumen kementerian yang terfragmentasi, dari insentif investasi hingga pengadaan barang/jasa, ke dalam target misi yang terukur, didukung pembentukan Dewan Misi terpadu, serta dilengkapi mekanisme pemutusan (*sunset clause*) bagi program yang nir-manfaat publik.

Peluang Diversifikasi Belum Menjadi Kapabilitas Industri



Gambar 1: Ilustrasi industri. (Sumber: Canva)

Struktur industri Indonesia memperlihatkan kesenjangan antara peluang diversifikasi dan kemampuan yang telah terbentuk. Atlas of Economic Complexity menempatkan Indonesia pada peringkat 69 dalam ECI 2024, turun enam peringkat dalam satu dekade. Pada saat yang sama, Indonesia berada pada peringkat 7 dunia dalam Complexity Outlook. Penelitian PRAKARSA juga mengidentifikasi 188 produk dengan Revealed Comparative Advantage (RCA) di atas satu. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah jalur diversifikasi yang relatif dekat dengan basis kemampuan produksinya, tetapi belum sepenuhnya mampu memasuki aktivitas bernilai tambah dan berkompleksitas lebih tinggi (Growth Lab, 2026; PRAKARSA, 2026).

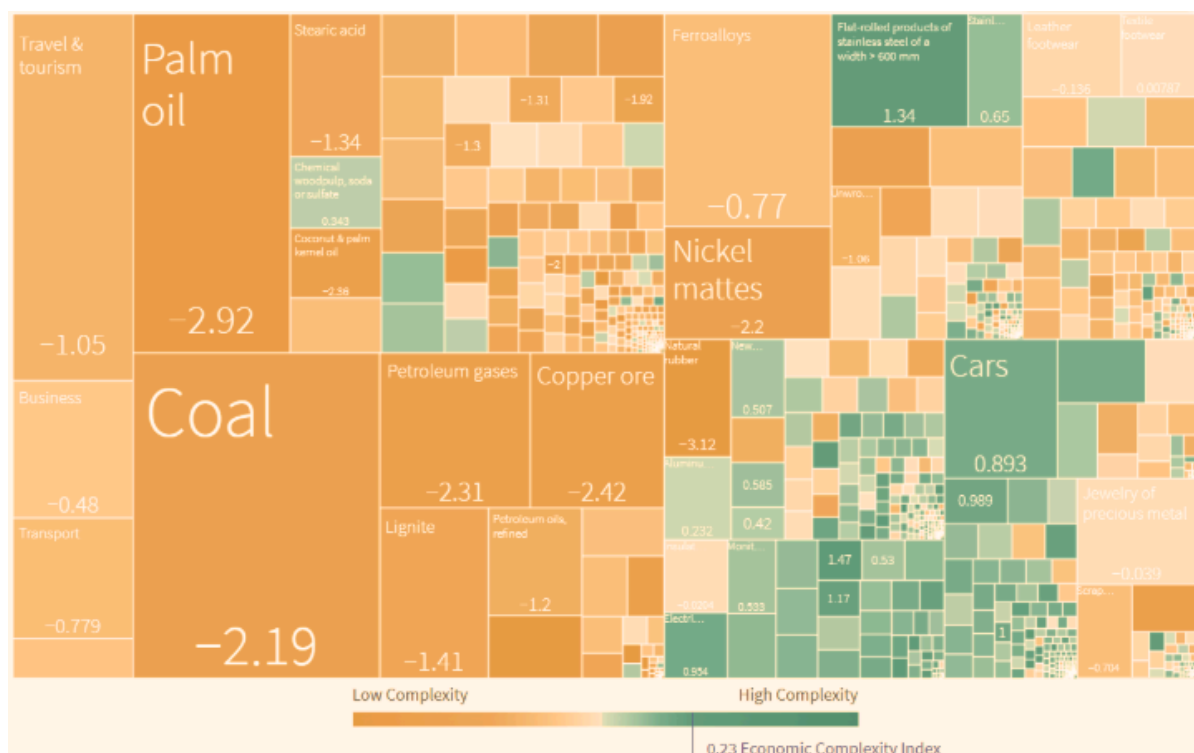
Pemerintah harus merombak tolak ukur keberhasilan kebijakan industri dari sekadar akumulasi investasi fisik menjadi penguasaan kapabilitas domestik. Peningkatan investasi, bertambahnya fasilitas produksi, dan perluasan hilirisasi tetap penting, tetapi belum cukup untuk menunjukkan transformasi struktural. Transformasi juga ditentukan oleh kemampuan perusahaan domestik memproduksi komponen yang lebih kompleks, menguasai teknologi, memperkuat kegiatan rekayasa dan desain, meningkatkan produktivitas pemasok, serta menciptakan pekerjaan yang memungkinkan akumulasi keterampilan.

BAB 1

Peluang Diversifikasi Belum Menjadi Kapabilitas Industri

Dalam kerangka ini, hilirisasi bukan merupakan tujuan akhir. Pengolahan sumber daya alam dapat meningkatkan nilai tambah dan memperluas basis produksi. Namun, manfaat jangka panjangnya bergantung pada kemampuan menggunakan pengetahuan yang terbentuk untuk memasuki produk, teknologi, dan kegiatan produksi baru. Tanpa proses tersebut, industrialisasi berisiko memperpanjang rantai pengolahan tanpa memperdalam kapabilitas yang melekat pada perusahaan, pekerja, dan lembaga pengetahuan di dalam negeri.

Komposisi ekspor memperjelas tantangan tersebut. Produk berkompleksitas rendah, terutama batu bara, minyak sawit, dan sejumlah produk mineral, masih menempati ruang yang besar dalam keranjang ekspor. Pada saat yang sama, keberadaan kendaraan dan beberapa produk manufaktur berkompleksitas lebih tinggi menunjukkan basis awal untuk diversifikasi. Tantangannya adalah memperbesar bagian ekspor yang ditopang oleh kapabilitas teknologi dan produksi yang lebih kompleks.



Gambar 2: Kompleksitas produk ekspor Indonesia di tahun 2024. (Sumber: Atlas Harvard, 2026)



Kapasitas inovasi yang masih terbatas memperkuat tantangan tersebut. Belanja penelitian dan pengembangan nasional atau *gross expenditure on research and development* hanya mencapai 0,28 persen PDB pada 2020, dibandingkan rata-rata ASEAN sekitar 1,07 persen. Indonesia juga memiliki sekitar 400 personel litbang per satu juta penduduk. Angka ini lebih rendah dibandingkan Malaysia 726, Vietnam 779, Thailand 2.024, dan Singapura 7.225 (OECD, 2024). Dengan basis pengetahuan dan tenaga ahli yang terbatas, investasi perlu diposisikan bukan hanya sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran teknologi dan pembentukan kemampuan baru.

Pengalaman KIN 2020–2024 menunjukkan bahwa tantangannya bukan semata karena keterbatasan instrumen kebijakan. Berbagai dukungan untuk investasi, penguasaan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya terikat oleh kerangka misi yang memberi arah (*directionality*) dan persyaratan (*conditionality*) yang menghubungkan dukungan dengan kontribusi atau capaian kapabilitas yang terukur.

Pembelajaran lainnya adalah pentingnya memperkuat monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari desain kebijakan. KIN 2020–2024 belum memiliki mekanisme yang memadai untuk merekam capaian pelaksanaan dan menggunakannya sebagai umpan balik dalam penyusunan KIN 2026–2030. Karena itu, KIN 2026–2030 perlu sejak awal menetapkan indikator hasil yang dapat menunjukkan apakah berbagai instrumen benar-benar menghasilkan pembentukan kapabilitas industri, sekaligus menyediakan mekanisme untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

BAB 2

Dukungan Industri Belum Diarahkan pada Hasil yang Sama

Dukungan Industri Belum Diarahkan pada Hasil yang Sama

Banyaknya instrumen industri yang diterbitkan pemerintah saat ini belum efektif dalam mendorong transformasi akibat ketiadaan target kapabilitas yang terpadu. Berbagai skema insentif investasi, perizinan, dan pelatihan keterampilan masih bergerak secara terpisah pada administratif dengan indikator sektoral masing-masing. Akibatnya, kucuran fasilitas publik gagal menghasilkan konvergensi keahlian dan transfer teknologi antarsektor.

Pada penguatan struktur industri, perbaikan iklim investasi belum selalu diikuti oleh keterkaitan produksi yang lebih dalam. Penelitian The PRAKARSA menunjukkan bahwa kemitraan antara industri besar dan industri kecil dan menengah masih banyak terkonsentrasi pada penyediaan bahan baku, konstruksi, pekerjaan sipil, dan jasa pendukung dengan nilai tambah relatif rendah. Keterlibatan perusahaan domestik dalam produksi komponen, kegiatan rekayasa, penguasaan teknologi, dan fungsi bernilai tambah tinggi masih terbatas (PRAKARSA, 2026).

Pola serupa terlihat pada kebijakan teknologi. Pemerintah telah menyediakan *tax holiday*, *tax allowance*, fasilitas impor, dan *superdeduction* untuk penelitian dan pengembangan. Namun, instrumen tersebut belum sepenuhnya dihubungkan dengan mekanisme pembelajaran teknologi, komersialisasi riset, penguatan hubungan industri-perguruan tinggi, atau pembentukan permintaan terhadap inovasi domestik. Insentif dapat memperbaiki kelayakan investasi, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan bahwa pengetahuan dan kemampuan teknis menyebar ke dalam perekonomian.



Gambar 3: Ilustrasi industri. (Sumber: Canva)

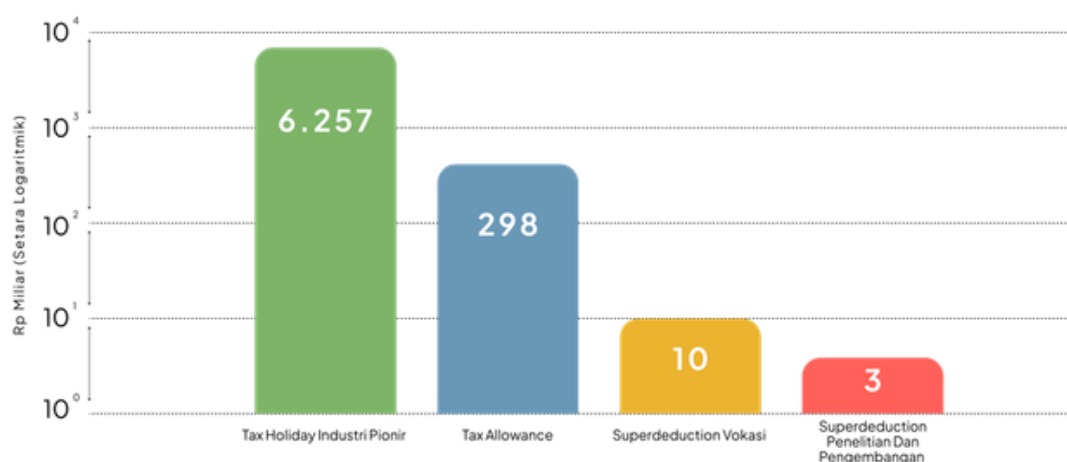
Kebijakan belanja perpajakan memperlihatkan ketimpangan tajam antara pemanjaan modal fisik dan pembiayaan kapabilitas inovasi. Laporan Belanja Perpajakan 2024 memperkirakan belanja perpajakan untuk *tax holiday* industri pionir sebesar Rp6,257 triliun dan *tax allowance* sebesar Rp298 miliar. Pada tahun yang sama, estimasi untuk *superdeduction* vokasi hanya Rp10 miliar dan *superdeduction* litbang Rp3 miliar (Kementerian Keuangan, 2025). Ketimpangan Rp6,2 triliun untuk insentif investasi versus Rp3 miliar untuk litbang adalah sinyal bahaya. Kebijakan fiskal kita saat ini masih memanjakan penanaman modal fisik, namun abai menuntut penciptaan inovasi domestik. Tanpa syarat kapabilitas (*conditionality*), penerima fasilitas menikmati rente fiskal sementara beban risiko pembangunan ditanggung publik.

Tabel 1. Estimasi belanja perpajakan terkait investasi dan pembentukan kapabilitas, 2024

Instrumen	Estimasi belanja perpajakan
Tax holiday industri pionir	Rp6,257 triliun
Tax allowance	Rp298 miliar
Superdeduction vokasi	Rp10 miliar
Superdeduction penelitian dan pengembangan	Rp3 miliar

Sumber: Kementerian Keuangan (2025).

Gambar 4: Perbedaan pemanfaatan fasilitas fiskal investasi dan pembentukan kapabilitas, 2024



Sumber: Kementerian Keuangan (2025). Catatan: sumbu vertikal menggunakan skala logaritmik agar nilai yang lebih kecil tetap terlihat.

BAB 2

Dukungan Industri Belum Diarahkan pada Hasil yang Sama

Perbedaan tersebut perlu dibaca sebagai persoalan desain kebijakan, bukan sebagai dasar untuk secara otomatis mengurangi insentif investasi atau memindahkan anggaran dari satu fasilitas ke fasilitas lain. Tantangannya adalah memastikan bahwa dukungan investasi juga mendorong kegiatan litbang, peningkatan kemampuan pemasok, pelatihan berjenjang, penguasaan teknologi, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Dukungan publik dengan demikian tidak berhenti pada keputusan investasi penerima fasilitas, tetapi menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi pekerja, perusahaan domestik, dan wilayah tempat industri beroperasi.

Tanpa persyaratan yang jelas, manfaat dukungan dapat terkonsentrasi pada perusahaan penerima, sementara biaya fiskal dan berbagai risiko pembangunan ditanggung lebih luas oleh publik. Karena itu, pertanyaan kebijakan tidak cukup berhenti pada berapa besar investasi yang terealisasi. Pemerintah juga perlu menilai kemampuan apa yang terbentuk, pada siapa kemampuan tersebut melekat, dan apakah manfaat publiknya sepadan dengan sumber daya yang digunakan.



Gambar 5: Ilustrasi industri. (Sumber: Canva)

KIN Perlu Mengubah Arah Industrialisasi Menjadi Misi yang Operasional



Gambar 6: Ilustrasi industri hijau. (Sumber: Canva)

Kementerian Perindustrian telah memperkenalkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), dengan perhatian pada hilirisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan ekosistem dan teknologi industri, industri hijau, serta penguatan sumber daya manusia industri. Arah tersebut memberi landasan bagi kebijakan industri, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan cara berbagai instrumen pemerintah harus dipadukan dan hasil apa yang digunakan untuk menilai keberhasilannya. KIN 2026-2030 perlu mengisi ruang operasional tersebut.

Pendekatan berorientasi misi dapat digunakan untuk menerjemahkan arah SBIN ke dalam sejumlah tantangan pembangunan yang terbatas dan terukur. Misi tidak identik dengan sektor prioritas atau proyek tunggal. Misi menjelaskan masalah yang ingin diselesaikan, misalnya penguasaan teknologi industri hijau, dekarbonisasi proses produksi, penguatan ketahanan energi dan pangan, atau penciptaan pekerjaan industri berkualitas, kemudian mengorganisasikan kontribusi berbagai sektor, teknologi, dan institusi untuk mencapainya.

Pendekatan ini setidaknya mempunyai empat fungsi. Pertama, *directionality* menetapkan arah perubahan dan hasil publik yang ingin dicapai. Kedua, portofolio kebijakan menggabungkan instrumen fiskal, investasi, pengadaan, litbang, pendidikan vokasi, pembiayaan, infrastruktur, dan pengembangan pemasok sesuai hambatan yang dihadapi. Ketiga, *conditionality* menghubungkan dukungan pemerintah dengan kontribusi yang dapat diverifikasi. Keempat, monitoring dan evaluasi adaptif memberi ruang untuk memperluas instrumen yang bekerja, memperbaiki desain yang belum efektif, dan menghentikan dukungan yang tidak lagi menghasilkan manfaat publik (Mazzucato & Rodrik, 2023).

Kompleksitas ekonomi mempunyai fungsi yang lebih spesifik dalam arsitektur tersebut. Analisis *product space*, *distance*, tingkat kompleksitas, dan *opportunity gain* dapat membantu mengidentifikasi produk atau teknologi yang relatif dekat dengan kapabilitas yang telah dimiliki, serta pilihan yang membutuhkan lompatan kemampuan lebih besar. Analisis ini membantu menyusun portofolio, tetapi tidak menggantikan keputusan strategis mengenai ketahanan ekonomi, dekarbonisasi, pekerjaan berkualitas, kebutuhan pasar domestik, dan dampak sosial-lingkungan. Dengan demikian, misi menjawab ke mana industrialisasi diarahkan, sedangkan kompleksitas ekonomi membantu menentukan dari basis kapabilitas mana transformasi dapat dimulai.

Transformasi Industri Juga Ditentukan di Daerah

Pembentukan kapabilitas tidak hanya berlangsung melalui kebijakan nasional. Penelitian The PRAKARSA terhadap RPIP di tujuh provinsi menunjukkan pola yang relatif konsisten: seluruh dokumen masih menautkan pembangunan industri terutama pada pemanfaatan keunggulan komparatif sumber daya alam. Diversifikasi menuju kegiatan yang lebih kompleks, eksperimen kebijakan, serta penguatan inovasi dan litbang belum memperoleh perhatian yang sama kuatnya (PRAKARSA, 2026).

Pemerintah daerah juga belum sepenuhnya menggunakan instrumen yang tersedia untuk membentuk permintaan dan mendorong peningkatan kemampuan industri. Pengadaan pemerintah daerah, insentif fiskal daerah, kemudahan perizinan, penyediaan tenaga kerja berkualitas, serta persyaratan sosial-lingkungan belum secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari strategi peningkatan kapabilitas. Akibatnya, RPIP berisiko menjadi daftar industri prioritas yang mengikuti struktur ekonomi yang sudah ada, bukan instrumen untuk mendorong perubahan struktur produksi.

KIN perlu menetapkan misi dan kerangka hasil pada tingkat nasional, sementara pemerintah daerah menerjemahkannya berdasarkan basis industri, kemampuan pemasok, tenaga kerja, perguruan tinggi, lembaga penelitian, infrastruktur, dan peluang diversifikasi masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut memungkinkan target nasional dijalankan melalui jalur yang berbeda di setiap daerah. Ukuran keberhasilan investasi daerah juga perlu diperluas: bukan hanya apakah pabrik berdiri dan menyerap tenaga kerja, tetapi apakah pekerja dan perusahaan lokal dapat meningkatkan posisinya dalam rantai produksi.

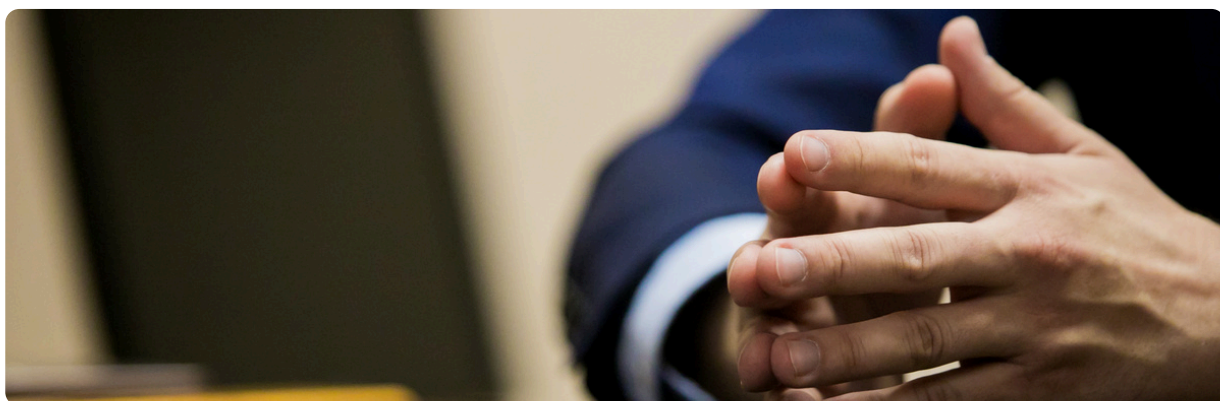


Gambar 7: ilustrasi pekerja industri. (Source: Canva)

BAB 5

Jendela Kebijakan 2026: Peluang KIN Menata Keselarasan Instrumen Lintas Kementerian

Jendela Kebijakan 2026: Peluang KIN Menata Keselarasan Instrumen Lintas Kementerian



Gambar 8: Ilustrasi pemerintahan. (Source: Canva)

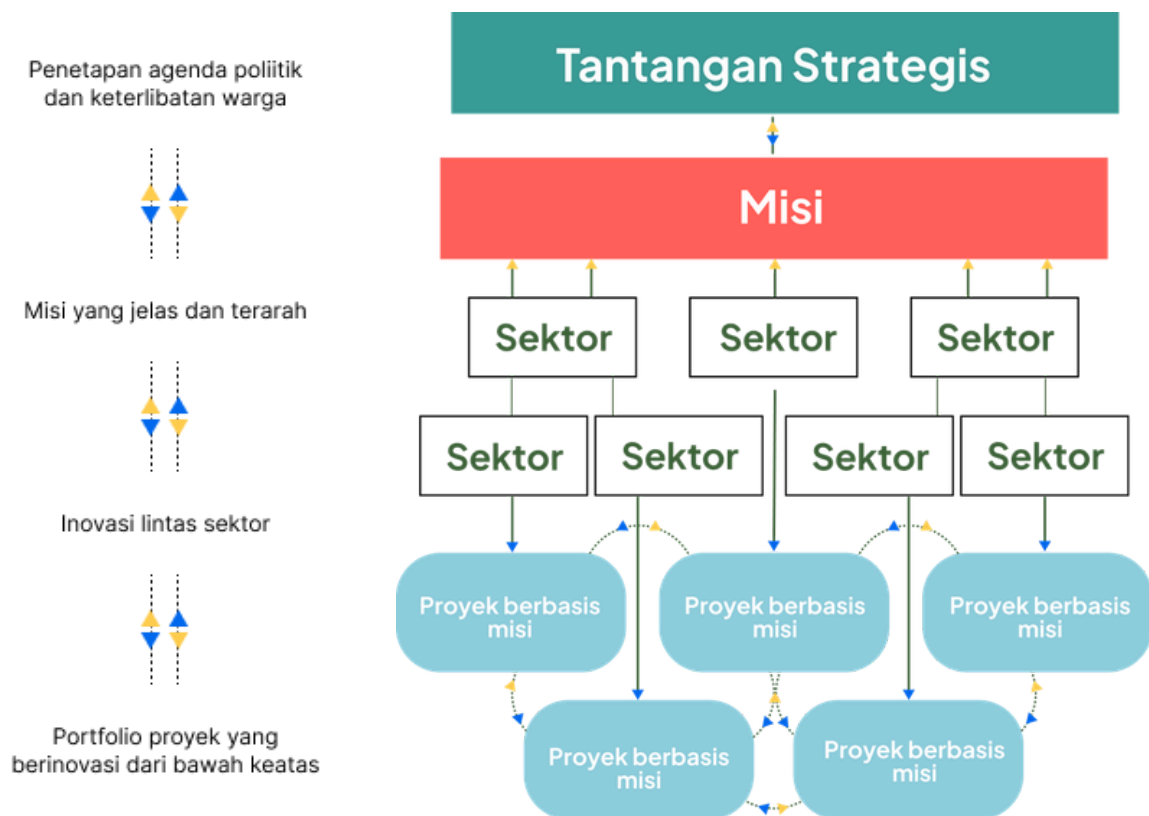
Momentum penyusunan Perpres KIN 2026-2030 pada tahun 2026 merupakan jendela krusial untuk menyatukan instrumen lintas kementerian yang selama ini terfragmentasi. KIN baru tidak boleh sekadar menjadi kompilasi administratif dari program yang sudah berjalan, seperti PP Perizinan Berbasis Risiko atau aturan pengadaan barang/jasa. Nilai strategis ini terletak pada mandat politiknya untuk mengikat seluruh fasilitas negara ke dalam target misi dan akuntabilitas publik yang seragam.

KIN baru tersebut tidak disusun dalam ruang kosong. Renstra Kementerian Perindustrian 2026-2030 telah berlaku sejak 31 Desember 2025. Sistem perizinan berusaha telah menggunakan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 juga memperbarui kebijakan pengadaan pemerintah, termasuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pasal 66. Pada saat yang sama, insentif investasi, program hilirisasi, kebijakan vokasi, dan berbagai program kementerian telah berjalan.

Urutan tersebut menimbulkan risiko kelembagaan. Apabila KIN hanya merangkum program yang telah ditetapkan, dokumen ini tidak akan memberi tambahan arah yang berarti. Nilai strategis KIN justru terletak pada kemampuannya mengikat instrumen yang telah berjalan ke dalam misi, pembagian peran, persyaratan, dan indikator kinerja yang sama. Karena itu, penyusunan KIN pada 2026 perlu digunakan untuk menata hubungan antara SBIN, Renstra Kementerian Perindustrian, instrumen lintas-kementerian, dan RPIP bukan menambah daftar program baru.

Membangun Tata Kelola untuk Pendekatan Berorientasi Misi

Pendekatan berorientasi misi membutuhkan koordinasi yang lebih kuat, tetapi tidak harus menghasilkan birokrasi permanen baru. Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian dapat membentuk mekanisme Dewan Misi untuk setiap misi prioritas. Mekanisme ini mempertemukan kementerian pemegang instrumen termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, LKPP, Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian yang menangani pendidikan tinggi, BRIN, Kemendagri, serta pemerintah daerah untuk menyepakati hasil, portofolio intervensi, pembagian peran, dan jadwal evaluasi.



Gambar 9: Tata kelola kebijakan industri berorientasi misi. (Sumber: Mazzucato, 2024)

BAB 6

Membangun Tata Kelola untuk Pendekatan Berorientasi Misi

Monitoring dan evaluasi juga perlu bergerak melampaui indikator input dan output administratif. Investasi, output, ekspor, dan jumlah pekerjaan tetap perlu dipantau, tetapi belum cukup untuk menilai pembentukan kapabilitas. Setiap misi memerlukan *scorecard* yang mencakup penguasaan teknologi, produktivitas dan peningkatan kelas pemasok, intensitas litbang, jenjang keterampilan, kualitas pekerjaan, difusi pengetahuan, serta kinerja sosial-lingkungan. Indikator perlu dipilih sesuai karakter misi, bukan diseragamkan untuk seluruh sektor.

Hasil evaluasi perlu mempunyai konsekuensi terhadap kebijakan. Dukungan dapat diperluas ketika menunjukkan hasil, didesain ulang ketika hambatan berubah, dan dihentikan melalui mekanisme sunset ketika tidak lagi menghasilkan manfaat publik. Dalam konteks ini, kegagalan program tidak selalu berarti kegagalan pemerintah, selama informasi yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki portofolio. Masalah muncul ketika dukungan terus berlanjut tanpa bukti hasil, tanpa penyesuaian desain, dan tanpa jalur penghentian yang jelas.



Gambar 10: Ilustrasi industri. (Source: Canva)

Rekomendasi Kebijakan

Penyusunan KIN 2026-2030 perlu difokuskan pada pengoperasian arah industrialisasi, bukan sekadar pembaruan daftar industri prioritas. Empat langkah berikut perlu menjadi bagian dari penyelesaian Rancangan Perpres KIN dan pengaturan pelaksanaannya.

01 Menerjemahkan arah SBIN menjadi sejumlah misi transformasi yang terbatas dan terukur.

Kementerian Perindustrian perlu merumuskan misi yang menjelaskan tantangan, kapabilitas yang ingin dibangun, hasil publik, indikator, dan tenggat pencapaiannya. Analisis kompleksitas ekonomi digunakan untuk menyusun portofolio produk dan teknologi, sementara pilihan akhirnya tetap mempertimbangkan ketahanan ekonomi, dekarbonisasi, pekerjaan berkualitas, dan dampak sosial-lingkungan. Portofolio perlu ditinjau berkala agar KIN tidak menjadi daftar prioritas yang statis.

02 Menyusun bauran kebijakan dan rencana aksi untuk setiap misi.

Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan sebagai pemegang instrumen perlu mengintegrasikan insentif fiskal, investasi, perizinan, pengadaan, pembiayaan, litbang, pendidikan vokasi, pengembangan pemasok, dan regulasi ke dalam satu portofolio. Setiap misi perlu dilengkapi rencana aksi yang menetapkan proyek, penanggung jawab, pembiayaan, tahapan pelaksanaan, indikator, dan jadwal evaluasi. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengadaan strategis, tanpa menjadikan TKDN sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

03 Mengaitkan dukungan publik dengan capaian yang dapat diverifikasi.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian perlu menghubungkan keberlanjutan fasilitas dengan milestone seperti investasi litbang, transfer teknologi, peningkatan pemasok domestik, pelatihan berjenjang, pekerjaan berkualitas, reinvestasi produktif, dan kinerja sosial-lingkungan. Persyaratan juga perlu mencakup akses terhadap teknologi yang dikembangkan dengan dukungan publik dan pembagian manfaat yang proporsional. Hasil evaluasi harus menentukan apakah dukungan diperluas, disesuaikan, dikurangi, atau dihentikan.

04 Membentuk Dewan Misi dan monitoring-evaluasi adaptif yang terhubung dengan RPIP.

Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian perlu membentuk Dewan Misi lintas-kementerian tanpa menciptakan birokrasi permanen baru. Mekanisme ini melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, BUMN, pelaku industri, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi pekerja. Setiap misi perlu memiliki *scorecard* kapabilitas dan kerangka hasil yang diterjemahkan ke dalam RPIP. Hasil evaluasi digunakan untuk memperluas kebijakan yang efektif, memperbaiki desain yang belum bekerja, dan menghentikan dukungan yang tidak lagi menghasilkan manfaat publik.

Kredit

Penulis:

Yuanda P. Harahap,
Bintang Aulia Lutfi,
Emma Seruni Ketaren,
R. Imam Kartaatmadja

Reviewer:

Roby Rushandie

Penanggung Jawab:

Dr. Victoria Fanggidae

Layout and Design:

Raka Adam Pangestu

Penerbit:

Perkumpulan
PRAKARSA,
Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8 E Kel/Kec.
Pasar Minggu
Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, Indonesia 12520

Referensi

Growth Lab, Harvard University. (2026).

Atlas of Economic Complexity: Indonesia Country Profile. Cambridge, MA: Harvard University.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025).

Laporan Belanja Perpajakan 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

(2026). Strategi Baru Industrialisasi Nasional, sebagaimana dimuat dalam dokumen perencanaan unit Kementerian Perindustrian.

Mazzucato, M., & Rodrik, D. (2023). Industrial Policy with

Conditionalities: A Taxonomy and Sample Cases. London: UCL Institute for Innovation and Public Purpose.

Organisation for Economic Co-operation and Development

(2024). OECD Economic Surveys: Indonesia 2024. Paris: OECD Publishing.

Perkumpulan PRAKARSA. (2026). Refleksi 10 Tahun RIPIN:

Memperkuat Kerangka Monitoring dan Evaluasi untuk Transformasi Industri. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang

Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024.



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, sebuah "think and do tank" yang berbasis organisasi masyarakat sipil. The PRAKARSA didirikan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur melalui pengembangan ide, reformasi kebijakan dan institusi, serta inovasi pemecahan masalah berbasis bukti. The PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Kami melakukan kegiatan penelitian, analisis kebijakan, dan pelatihan di berbagai topik terkait isu kesejahteraan. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan, kami secara konsisten mengadopsi pendekatan kolaboratif dan *engagement* untuk bekerja sama dengan berbagai pihak: pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, universitas, lembaga penelitian, organisasi internasional, sektor swasta, lembaga donor pembangunan, dan media massa.

Kami percaya bahwa pendekatan multi-stakeholder ini akan memperkuat karya dan inisiatif kami dalam produksi dan penyebaran pengetahuan serta proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Kami juga percaya bahwa jejaring kerja akan memfasilitasi dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, kami telah menerima dukungan dari berbagai donor dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif bersama mitra The PRAKARSA.

www.theprakarsa.org

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan



+62 21 7881 798



perkumpulan@theprakarsa.org



The PRAKARSA



PRAKARSA Podcast